

Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Keluarga di Pariaman

Elsa Rahayu¹, Dian Aulia Purnama², Muliati Sukma³, Fadilla Saputri⁴,
Delmira Syafrini^{5*}

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

*Corresponding author, e-mail: delmirasyafrini@fis.unp.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman, yang merupakan fenomena sosial yang kompleks dan memiliki dampak negatif terhadap korban. Penelitian ini menarik untuk dilakukan/penting dilakukan karena pelecehan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam bagi korban, terutama anak-anak dan perempuan, yang sering kali mengalami perasaan takut, malu, dan kehilangan kepercayaan diri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung interaksi sosial di lingkungan tempat korban tinggal, sedangkan wawancara dilakukan terhadap korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, pekerja sosial, dan aparat desa atau pihak terkait lainnya. Studi dokumentasi digunakan untuk mengkaji data dari laporan kasus, berita media, serta dokumen lembaga sosial. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling. Kriteria informan antara lain adalah korban atau penyintas pelecehan seksual dalam keluarga, anggota keluarga korban, tokoh adat atau agama, aktivis perlindungan anak dan perempuan, serta pihak aparat yang pernah menangani kasus tersebut. Jumlah informan dalam penelitian ini berkisar antara 5 hingga 6 orang, bergantung pada kedalaman data yang diperoleh dan prinsip saturasi informasi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang meliputi proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Teknik analisis data penelitian menggunakan teknik analisis interaktif dari Miles dan Huberman meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman menghadapi berbagai bentuk stigma sosial yang memperparah penderitaan mereka. Oleh karena itu, korban mengalami tekanan psikologis dan sering kali tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat.

Kata Kunci: Keluarga; Korban; Masyarakat Pariaman; Pelecehan Seksual; Stigma sosial.

Abstract

This study aims to examine the societal stigma faced by victims of sexual abuse within the family in Pariaman, a complex social phenomenon that has significant negative impacts on the victims. This research is considered important because sexual abuse committed by family members causes deep psychological trauma, especially for children and women, who often experience fear, shame, and a loss of self-confidence. The study employs a qualitative approach with a case study design. Data collection techniques include observation, interviews, and document analysis. Observations were conducted to directly observe social interactions in the victim's community, while interviews were carried out with victims, their family members, community leaders, social workers, and relevant local authorities. Document analysis involved reviewing case reports, media coverage, and records from social organizations. The selection of informants was conducted using purposive sampling. The informant criteria included victims or survivors of intra-familial sexual abuse, family members of victims, traditional or religious leaders, child and women protection activists, and officials who had handled related cases. The number of informants in this study ranged from 5 to 6 individuals, depending on the depth of the data obtained and the principle of data saturation. Data analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, which includes data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings of this study indicate that victims of sexual abuse within families in Pariaman face various forms of social stigma that

exacerbate their suffering. As a result, victims experience severe psychological distress and often do not receive adequate support from the community.

Keywords: Family; Pariaman Community; Sexual Harassment; Social Stigma; Victims.

How to Cite: Rahayu, E. et al. (2025). Stigma Masyarakat Terhadap Korban Pelecehan Seksual dalam Keluarga di Pariaman. *Social Empirical: Prosiding Berkala Ilmu Sosial, Vol. 2 No. 1 Tahun 2025*. (pp. 87-95). Padang: Universitas Negeri Padang.



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2025 by author.

Pendahuluan

Pelecehan seksual adalah hal yang dilakukan oleh orang lain dengan lawan jenis. Hal ini berkaitan dengan kekerasan pelecehan seksual dan korban merasa tidak nyaman dengan itu. Jadi pelecehan seksual ini dilakukan dengan cara memaksa korban untuk melakukan apa yang diinginkannya. Pelecehan seksual meliputi tingkat ringan berupa kata-kata, sentuhan fisik, tatapan mata, atau tingkat berat yaitu pemerkosaan (Qurotul et al., 2022). Setelah mengalami kekerasan korban sering kali, mengalami berbagai reaksi psikologis awal yang intens. Ini bisa berupa shock, ketakutan, kebingungan, dan rasa tidak berdaya. Reaksi ini adalah bagian dari respons alami tubuh terhadap trauma, yang dirancang untuk melindungi individu dari ancaman lebih lanjut (Ummah, 2019).

Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan tahun 2020, kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat secara signifikan selama masa pandemi Covid-19, dengan total 1.731 kasus, di mana pelecehan dan kekerasan seksual mendominasi bentuk kekerasan tersebut. Sedangkan menurut data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) tahun 2021, terdapat 13.615 kasus kekerasan di seluruh Indonesia, dan 5.488 di antaranya adalah kasus kekerasan seksual (Putri, 2021). Angka-angka ini tidak hanya mencerminkan tingginya insiden kekerasan seksual, tetapi juga menunjukkan urgensi perlunya pendekatan sosial untuk memahami bagaimana masyarakat merespons kasus-kasus tersebut, terutama ketika pelakunya berasal dari dalam keluarga.

Penelitian tentang stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman dilakukan karena masih kuatnya budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dalam masyarakat, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Di kota Pariaman, yang memiliki struktur sosial kekerabatan yang erat dan nilai adat yang kuat, korban sering kali mengalami tekanan untuk diam demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari aib sosial. Korban bahkan dianggap telah merusak keharmonisan keluarga atau memalukan nama baik kerabat apabila melaporkan pelaku, terutama jika pelaku merupakan sosok yang dihormati dalam komunitas. Stigma ini menciptakan ketakutan, keterasingan sosial, serta penderitaan psikologis yang mendalam pada korban, yang pada akhirnya menghambat proses pelaporan dan pemulihan (Prameswari & Khoirunnisa, 2020).

Korban pelecehan seksual dalam keluarga sering kali mengalami kesulitan untuk mengungkapkan apa yang mereka alami karena adanya tekanan dari lingkungan dan rasa takut akan stigma negatif. Hal ini diperparah oleh pandangan masyarakat yang masih cenderung menyalahkan korban, mempertanyakan kebenaran cerita korban, bahkan menganggap aib keluarga lebih penting daripada keadilan bagi korban (Mas'udah, 2022). Dalam penelitiannya menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual kerap menerima sanksi sosial dari lingkungan sekitar seperti teman, tetangga, dan bahkan di media sosial, yang semakin memperkuat rasa takut korban untuk melapor. Studi tersebut menyoroti pentingnya perlindungan menyeluruh bagi korban dari keluarga, komunitas, masyarakat, dan negara demi mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Hal ini sangat memengaruhi tingkat pelaporan kasus dan proses pemulihan psikologis korban.

Huraerah (2012) mengemukakan bahwa kekerasan seksual sering terjadi di dalam rumah (48%), yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi anak dan perempuan. Namun dalam kenyataannya, rumah justru menjadi tempat yang rawan terjadinya kekerasan, terutama dari orang terdekat seperti ayah, paman, kakak, atau anggota keluarga lainnya. Ketika pelecehan terjadi dalam lingkungan keluarga, korban tidak hanya mengalami trauma secara fisik dan psikologis, tetapi juga harus menghadapi pengucilan sosial, penolakan dari keluarga besar, hingga tekanan untuk berdamai demi menjaga nama baik keluarga.

Masyarakat Indonesia masih memberi stigma buruk para korban kekerasan seksual ini, meskipun tidak semuanya begitu. Salah satu stigma di masyarakat terhadap korban kekerasan seksual adalah “wanita nakal atau wanita malam” yang menggunakan pakaian minim sehingga mengundang hasrat seksual orang

lain. Selain itu, adanya stigma bahwa kekerasan seksual adalah aib yang harus dipendam dan tidak seharusnya diceritakan ke orang lain. Kedua stigma tersebut paling sering digunakan untuk “melabeli” para korban kekerasan seksual. Dari stigma-stigma tersebut, justru akhirnya korban kekerasan seksual yang dikucilkan dari masyarakat karena dianggap memalukan dan menjadi aib masyarakat. Keluarga korban kekerasan seksual juga mendapatkan dampaknya yakni dilabeli sebagai keluarga yang “gagal” atau bahkan keluarga “nakal” karena salah satu anggota keluarga mereka menjadi korban kekerasan seksual (Pahlevi, 2021).

Penelitian tentang stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman dilakukan karena masih kuatnya budaya menyalahkan korban (*victim blaming*) dalam masyarakat, terutama ketika pelaku berasal dari lingkungan keluarga sendiri. Di kota Pariaman, yang memiliki struktur sosial kekerabatan yang erat dan nilai adat yang kuat, korban sering kali mengalami tekanan untuk diam demi menjaga nama baik keluarga atau menghindari aib sosial. Korban bahkan dianggap telah merusak keharmonisan keluarga atau memalukan nama baik kerabat apabila melaporkan pelaku, terutama jika pelaku merupakan sosok yang dihormati dalam komunitas. Stigma ini menciptakan ketakutan, keterasingan sosial, serta penderitaan psikologis yang mendalam pada korban, yang pada akhirnya menghambat proses pelaporan dan pemulihan (Prameswari & Khoirunnisa, 2020) dalam studinya tentang fenomena *victim blaming* di kalangan mahasiswa, mengungkapkan bahwa masyarakat cenderung menyalahkan korban karena cara berpakaian atau perilaku sosial mereka, yang memperkuat persepsi negatif terhadap korban dan melemahkan dukungan sosial yang semestinya diterima.

Soehardiman et al. (2024) dalam studi fenomenologisnya menemukan bahwa resiliensi perempuan korban kekerasan seksual sangat dipengaruhi oleh keberadaan stigma masyarakat. Korban merasa terhambat dalam proses penyembuhan akibat pandangan negatif yang terus-menerus diarahkan kepada mereka. Sementara itu, Khristianti (2021) menyoroti perlindungan hak asasi manusia terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia. Mereka menekankan bahwa belum adanya payung hukum yang komprehensif memperburuk posisi korban yang sudah terstigma di masyarakat. studi kasus oleh Darmayasa & Natanael (2023) mengungkapkan bahwa gangguan stres pascatrauma sering terjadi pada korban pelecehan seksual, terutama bila pelecehan dilakukan dalam lingkungan keluarga sendiri. Hal ini diperburuk oleh tekanan sosial dan konflik internal dalam keluarga yang menyebabkan korban menarik diri dan kehilangan kepercayaan terhadap orang di sekitarnya.

Habibah (2025) meneliti hubungan antara dukungan keluarga dengan tingkat kecemasan pada korban pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari keluarga memiliki peran penting dalam mereduksi kecemasan dan rasa takut korban. Sebaliknya, ketika korban tidak mendapat dukungan, mereka cenderung menarik diri dan mengalami tekanan mental lebih besar, yang diperparah oleh stigma sosial.

Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan dengan berfokus pada konstruksi stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mereduksi stigma tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial dan budaya yang memengaruhi perlindungan terhadap korban, serta menjadi dasar bagi formulasi kebijakan yang lebih berpihak pada korban kekerasan seksual di lingkungan keluarga.

Pendekatan lokal dan kontekstual ini menjadi kebaruan utama yang belum banyak diangkat dalam penelitian-penelitian sebelumnya. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bentuk-bentuk stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman serta bagaimana stigma tersebut memengaruhi keberanian korban dalam mengungkapkan kasus dan mencari keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada bulan Februari 2025. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kajai, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Pariaman. Teknik pengumpulan informan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria informan dengan mempertimbangkan relevansi dan kedalaman informasi yang dapat diberikan oleh subjek. Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi: pertama, korban pelecehan seksual dalam keluarga yang bersedia memberikan informasi mengenai pengalaman pribadi dan dampak sosial yang dirasakan. Kedua, tokoh masyarakat atau tokoh adat yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini masyarakat dan penerapan norma adat di lingkungan tempat tinggal. Ketiga, masyarakat umum, baik laki-laki maupun perempuan, yang berdomisili di wilayah penelitian dan memiliki pandangan terhadap kasus-kasus pelecehan seksual dalam keluarga.

Observasi dilakukan secara langsung dengan mengamati interaksi sosial, sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespons kasus-kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan mereka, baik dalam

forum masyarakat, interaksi keseharian, maupun pada saat kegiatan keagamaan dan adat. Wawancara dilakukan secara mendalam dan semi-terstruktur, ditujukan kepada informan yang telah dipilih sesuai kriteria. Dalam proses wawancara, peneliti menggunakan pendekatan yang empatik dan etis untuk menjaga kenyamanan serta kerahasiaan identitas korban, serta menyesuaikan alur wawancara dengan konteks emosional informan agar data yang diperoleh tetap valid dan kaya makna. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen terkait seperti foto atau video.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan menyortir data lapangan untuk memilih informasi yang relevan dengan fokus penelitian, seperti bentuk-bentuk stigma yang muncul, aktor yang terlibat dalam pembentukan stigma, serta dampaknya terhadap korban. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk menunjukkan keterkaitan antar tema dan kategori sosial. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, di mana peneliti menginterpretasikan makna di balik stigma yang terjadi, serta implikasinya terhadap penanganan korban dan pembentukan kebijakan berbasis perlindungan korban. Kesimpulan yang diperoleh senantiasa diuji ulang dengan membandingkan antar sumber data untuk menjamin validitas temuan, serta memperkuat argumentasi dengan refleksi terhadap konteks sosial-budaya masyarakat Pariaman. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu menggambarkan dinamika stigma secara mendalam sekaligus memberikan rekomendasi untuk mengurangi beban sosial yang dialami oleh korban pelecehan seksual dalam keluarga.

Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kota Pariaman, peneliti menemukan bahwa sikap masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga menunjukkan perkembangan positif. Tidak seperti yang umumnya terjadi di banyak wilayah lain, masyarakat di beberapa lingkungan di Pariaman tidak menunjukkan sikap menghakimi atau mengucilkan korban. Sebaliknya, mereka cenderung bersikap netral, bahkan menunjukkan empati dan dukungan moral terhadap korban. Adapun poin-poin temuan lapangan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sikap Netral dan Tidak Menghakimi

Beberapa warga yang menjadi informan menyatakan bahwa pelecehan seksual dalam keluarga adalah bentuk kejahatan yang sepenuhnya menjadi tanggung jawab pelaku, bukan korban. Warga cenderung tidak menyalahkan korban dan lebih melihatnya sebagai pihak yang perlu dilindungi. Hal ini menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan seksual. Hal ini disampaikan oleh korban yaitu, M (13 tahun) sebagai berikut:

“...Setelah kejadian tersebut saya awalnya mengira jika kasus ini diketahui oleh masyarakat, saya akan dihakimi dan disalahkan atas kasus tersebut. Namun ternyata masyarakat justru tidak menyalahkan saya atau me saya atas kasus yang telah terjadi. Masyarakat tetap bersikap netral dan justru menyalahkan pelaku atas kasus tersebut...”(Wawancara, 5 Mei 2025).

Diketahui dalam wawancara di atas bahwa korban tidak disalahkan dan dihakimi oleh masyarakat sekitar. Justru masyarakat bersikap netral dan tidak memandang kejadian tersebut dari satu sisi saja melainkan melihat dari kedua sisi. Dan masyarakat sekitar pun tidak mau ikut campur atas kejadian tersebut. Dalam berbagai penelitian, masyarakat yang memiliki sikap empatik dan tidak menghakimi cenderung lebih mampu menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi korban, sehingga korban lebih berani untuk bersuara dan mencari bantuan hukum maupun psikologis. Masyarakat bersikap netral dan tidak memandang kejadian tersebut secara sempit dari satu sisi saja, melainkan mencoba memahami latar belakang peristiwa secara utuh. Hal ini juga menandakan bahwa masyarakat mulai memiliki kesadaran kritis terhadap isu kekerasan seksual, di mana pelaku dianggap sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan korban secara fisik dan psikologis.

Meskipun masyarakat bersikap netral dan tidak menunjukkan kecenderungan untuk menyudutkan korban, mereka juga memilih untuk tidak ikut campur terlalu dalam dalam ranah pribadi korban. Sikap ini dapat diartikan sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi korban, namun juga dapat menjadi tantangan apabila tidak diiringi dengan dukungan konkret seperti pelaporan kepada pihak berwajib atau fasilitasi akses ke lembaga perlindungan anak dan perempuan. Partisipasi masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual di lingkungan sosial sangat penting sebagai bagian dari upaya pencegahan kekerasan yang lebih luas. Kehadiran masyarakat yang aktif mendukung korban mampu menciptakan ruang aman, mempercepat pemulihan psikososial, dan memberdayakan korban agar bisa bangkit secara mandiri (Rahmi & Siregar, 2020)

Selain itu, dalam perspektif sosiologi hukum, sikap masyarakat yang tidak menyalahkan korban menunjukkan adanya perubahan nilai sosial yang sebelumnya seringkali menganggap perempuan atau anak sebagai pihak yang “mengundang” kekerasan karena pakaian atau perilaku mereka. Perubahan ini menandakan bahwa masyarakat mulai mampu membedakan antara nilai moral individual dan prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini, masyarakat tidak hanya bersikap netral, tetapi juga menunjukkan keberpihakan terhadap keadilan dengan tidak menyudutkan korban. dalam konteks budaya lokal di Pariaman, yang cenderung masih memegang teguh nilai-nilai kekeluargaan dan menjaga kehormatan keluarga, perubahan sikap ini cukup signifikan. Hal ini menunjukkan adanya transisi sosial menuju pola pikir yang lebih inklusif dan adil terhadap korban kekerasan seksual.

Tidak Ada Pengucilan Sosial

Korban tidak mengalami pengucilan atau perlakuan diskriminatif dari masyarakat sekitar. Peneliti mencatat bahwa setelah kasus terungkap, korban tetap diterima di lingkungan sosialnya, baik di sekolah maupun di tempat tinggal. Korban menyampaikan bahwa meskipun awalnya merasa malu, ia tetap mendapatkan dukungan dari tetangga dan teman-temannya. Fakta bahwa korban tidak mengalami pengucilan sosial menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pola pikir masyarakat. Ini menandakan bahwa stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual mulai memudar.

Korban yang menjadi subjek wawancara menyatakan bahwa mereka tidak mengalami pengucilan sosial pasca terungkapnya kasus yang menimpa mereka. Seorang korban lainnya, S (15 tahun), menjelaskan:

“...Saya masih bisa sekolah, teman-teman tetap menyapa saya. Ibu-ibu di lingkungan juga tidak pernah membicarakan saya secara buruk. Mereka malah memberi dukungan pada saya agar tetap kuat...” (Wawancara, 6 Mei 2025)

Hal ini menunjukkan adanya perubahan pola pikir masyarakat dalam menerima korban pelecehan seksual sebagai bagian dari komunitas, bukan sebagai ancaman atau sumber malu. Dalam konteks ini, teori fungsionalisme struktural oleh Talcott Parsons dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa masyarakat akan berjalan harmonis ketika setiap individu termasuk korban kekerasan mendapatkan peran dan dukungan dalam sistem sosial. Dukungan dari lingkungan sosial turut mempercepat pemulihan korban secara psikologis dan mengurangi risiko trauma berkepanjangan. dalam banyak konteks sosial, korban kerap dianggap sebagai aib dan sering dijauhi. Namun, dalam kasus ini, korban tetap diterima dan dihargai sebagai bagian dari komunitas. Fenomena ini dapat dianalisis menggunakan pendekatan fungsionalisme struktural, dimana masyarakat berfungsi secara harmonis ketika setiap individu merasa diterima dan memiliki peran. Dukungan sosial dari tetangga dan teman memberikan rasa aman dan mempercepat proses pemulihan korban.

Fenomena ini menjadi indikasi kuat adanya perubahan pola pikir masyarakat terhadap korban kekerasan seksual. Jika sebelumnya korban sering kali dianggap sebagai aib keluarga atau beban sosial yang mencoreng nama baik komunitas, kini korban mulai dilihat secara lebih manusiawi dan empatik. Masyarakat tidak lagi melihat mereka dari sudut pandang moralistik semata, tetapi memahami bahwa mereka adalah korban yang membutuhkan perlindungan dan dukungan, bukan kecaman. Dalam konteks ini, teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Dalam perspektif ini, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang saling berkaitan dan memiliki fungsi masing-masing dalam menjaga keseimbangan dan keteraturan sosial. Jika setiap individu menjalankan perannya secara fungsional, maka masyarakat akan berjalan secara harmonis.

Penerimaan masyarakat terhadap korban kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk peran sosial yang berkontribusi terhadap stabilitas sistem sosial. Korban yang tetap diterima dan diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, berinteraksi sosial, dan memperoleh dukungan emosional menunjukkan bahwa masyarakat berupaya mempertahankan harmoni sosial, bukan menciptakan konflik atau perpecahan. Dalam konteks fungsionalisme, dukungan sosial ini menjadi fungsi laten yang sangat berperan dalam mempercepat pemulihan psikologis korban. Ketika korban merasa diterima, aman, dan tidak dihakimi, mereka cenderung memiliki resiliensi yang lebih tinggi untuk bangkit dari trauma dan menjalani proses penyembuhan secara lebih positif. Masyarakat yang mampu menjalankan fungsi ini menunjukkan kapasitasnya sebagai sistem sosial yang adaptif dan progresif.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Albarri dan Sofiana (2023) yang meneliti model intervensi komunitas dalam penanganan korban kekerasan seksual. Dalam studi mereka, pendekatan berbasis komunitas terbukti mampu menciptakan ruang aman bagi korban, di mana masyarakat sekitar tidak bersikap menghakimi tetapi justru memberikan dukungan moral dan praktis. Pendekatan komunitas ini tidak hanya memfasilitasi pemulihan psikologis korban, tetapi juga mendorong korban untuk lebih berani mengakses layanan hukum dan psikologis tanpa rasa takut akan stigma. Albarri dan Sofiana menjelaskan bahwa

pendampingan berbasis komunitas memberi peluang bagi korban untuk menjalani peran sosialnya secara normal tanpa dibayang-bayangi rasa malu yang berlebihan. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat bisa menjadi agen pemulihan yang efektif ketika nilai-nilai empati dan solidaritas ditanamkan dalam interaksi sosial sehari-hari.

Selain itu, studi oleh Love et al. (2017) dalam jurnal *Critical and Radical Social Work* juga memperkuat gagasan bahwa dukungan komunitas yang kuat dan empatik terhadap korban kekerasan seksual sangat menentukan keberhasilan proses pemulihan korban. Dalam studi tersebut dijelaskan bahwa pendekatan yang berbasis pada komunitas lokal, yang memahami kondisi korban dan tidak mengucilkan mereka, secara signifikan mengurangi beban psikologis dan sosial yang ditanggung korban. Komunitas dalam konteks ini tidak lagi menjadi sumber stigma, tetapi justru menjadi pilar penyembuhan yang mampu menguatkan korban untuk bangkit dan menjalani kehidupan secara lebih sehat. Love dan rekan-rekannya juga menegaskan bahwa penerimaan sosial dari komunitas turut membantu korban untuk membangun kembali harga diri dan kepercayaan terhadap lingkungan sekitar.

Dengan adanya dukungan dari masyarakat sekitar, korban tidak merasa sendirian dalam menghadapi beban psikologis akibat kekerasan yang mereka alami. Proses penyembuhan menjadi lebih cepat, dan mereka memiliki semangat untuk melanjutkan hidup serta mengejar cita-cita mereka. Fenomena ini merupakan salah satu contoh nyata bagaimana struktur sosial dapat berfungsi secara positif dalam mengatasi dampak sosial dari kekerasan seksual. Ketika masyarakat menjalankan fungsinya dengan memberikan dukungan dan menciptakan ruang inklusif bagi korban, maka struktur sosial akan tetap stabil dan mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Dalam hal ini, pendekatan fungsionalisme struktural tidak hanya melihat masyarakat dari aspek normatif, tetapi juga mampu menjelaskan dinamika perubahan nilai yang terjadi dalam konteks sosial kekinian.

Kesimpulannya, fakta bahwa korban tidak mengalami pengucilan sosial menunjukkan bahwa masyarakat tengah mengalami pergeseran nilai ke arah yang lebih positif dan progresif. Dukungan yang diberikan oleh tetangga, teman sekolah, dan lingkungan sekitar mencerminkan nilai empati yang semakin kuat dalam masyarakat. Perubahan ini penting untuk terus dipertahankan dan diperluas, karena penerimaan sosial terhadap korban kekerasan seksual menjadi salah satu faktor utama dalam upaya menciptakan masyarakat yang aman, inklusif, dan berkeadilan gender. Masyarakat bukan lagi hanya sekadar saksi atas kasus kekerasan, tetapi menjadi bagian penting dari sistem pendukung yang mampu memutus rantai trauma dan mempercepat proses pemulihan korban.

Tumbuhnya Rasa Empati dan Solidaritas

Beberapa tokoh masyarakat ninik mamak dan pemuda setempat justru berusaha memberikan semangat kepada korban dan mendukung upaya pelaporan ke pihak berwajib. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif untuk melindungi korban dan tidak lagi menutupi kasus pelecehan dengan dalih menjaga nama baik keluarga. Tindakan ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial, dari budaya tutup mulut demi menjaga "nama baik" keluarga menuju budaya akuntabilitas dan perlindungan hak korban. Kesadaran kolektif yang tumbuh menjadi fondasi penting dalam membangun sistem sosial yang lebih adil dan berempati. Dalam beberapa kasus, justru muncul sikap solidaritas dari masyarakat, terutama dari tokoh adat (ninik mamak) dan pemuda setempat. Mereka berinisiatif untuk mendampingi korban dan keluarganya dalam proses hukum. Seorang ninik mamak di Pariaman Barat menyampaikan:

"...Kami tidak bisa lagi diam. Kalau dulu kami jaga nama baik keluarga, sekarang kami lebih pikir keselamatan anak. Kalau tidak kita bantu korban, siapa lagi? Pelaku harus diproses, dan anak harus diselamatkan..." (Wawancara, 3 Mei 2025).

Pernyataan ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial dari budaya tutup mulut (*code of silence*) menjadi budaya akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai menempatkan keadilan dan keselamatan anak sebagai prioritas utama. Solidaritas ini juga tercermin dalam tindakan nyata, seperti mengantarkan korban ke rumah sakit, membantu pelaporan ke kepolisian, dan memberikan pendampingan emosional bagi keluarga.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Listyaningsih & Ismanto (2022) disebutkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendampingi korban kekerasan seksual, terutama di wilayah dengan struktur sosial yang kuat seperti di pedesaan atau komunitas adat, berperan besar dalam membangun kepercayaan diri korban dan mempercepat pemulihan trauma. Solidaritas tersebut juga memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap kelompok rentan.

Lebih lanjut, teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan oleh Talcott Parsons juga dapat digunakan untuk memahami fenomena ini. Dalam pandangan Parsons, masyarakat akan berfungsi secara optimal jika seluruh elemen di dalamnya menjalankan peran dan fungsinya secara seimbang. Dalam konteks ini, peran masyarakat sebagai pelindung dan pendukung korban merupakan fungsi sosial yang penting agar

sistem sosial tetap berjalan secara harmonis. Ketika masyarakat menerima korban sebagai bagian dari komunitas dan turut mendukung proses hukumnya, maka mereka telah menjalankan fungsi kolektif untuk menjaga stabilitas dan integrasi sosial. Perubahan sikap masyarakat ini sekaligus menjadi indikator bahwa stigma negatif terhadap korban kekerasan seksual mulai terkikis, dan digantikan oleh kesadaran bersama untuk menciptakan ruang sosial yang lebih adil, aman, dan berempati.

Dengan demikian, tumbuhnya empati dan solidaritas dari masyarakat bukan hanya menjadi respon terhadap satu kasus, tetapi juga mencerminkan transformasi nilai yang lebih luas dalam masyarakat. Budaya diam dan rasa malu mulai ditinggalkan, digantikan dengan keberanian untuk bersuara dan mendukung korban. Ini merupakan langkah penting dalam membangun sistem sosial yang berpihak pada keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan kolektif masyarakat menjadi landasan penting dalam menciptakan sistem penanganan kekerasan seksual yang berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan korban. Oleh karena itu, kesadaran kolektif dan keberanian masyarakat untuk bertindak mendampingi korban harus terus diperkuat, agar budaya akuntabilitas dan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dapat tertanam secara permanen dalam struktur sosial kita (Listyaningsih & Ismanto, 2022).

Peran Aktif Keluarga dan Lembaga Sosial

Keluarga korban dalam beberapa kasus bahkan menjadi pihak yang paling awal melaporkan pelaku ke aparat penegak hukum. Hal ini merupakan sinyal bahwa terjadi pergeseran cara pandang terhadap isu kekerasan seksual, di mana perlindungan terhadap korban mulai diutamakan. Keluarga korban yang melaporkan kasus ke aparat penegak hukum adalah bentuk keberanian yang tidak umum di banyak wilayah. Ini mencerminkan transformasi sosial dalam keluarga sebagai agen perubahan.

Dalam banyak kasus yang ditemukan, keluarga korban berperan aktif dalam upaya penanganan, bahkan menjadi pihak pertama yang melapor ke pihak berwenang. Hal ini merupakan bentuk keberanian sosial yang penting dalam melawan budaya diam yang selama ini menutupi kekerasan seksual dalam keluarga. Seorang ibu korban, yang anaknya dilecehkan oleh kerabat dekat, menyatakan:

“...Kami tidak mau tutup-tutupi lagi. Anak kami harus diselamatkan. Waktu itu saya langsung lapor ke polisi. Biar pelaku tanggung jawab dan anak saya bisa pulih...”
(Wawancara, 4 Mei 2025).

Selain keluarga, lembaga sosial seperti sekolah, lembaga perlindungan anak, dan organisasi masyarakat sipil juga memainkan peran signifikan. Guru sekolah korban bahkan turut memberi kesaksian dan mendampingi korban dalam sesi konseling. Kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan organisasi masyarakat memperlihatkan bahwa ada modal sosial aktif yang bisa dimobilisasi dalam kasus-kasus kekerasan seksual.

Ketika keluarga tidak lagi bungkam, hal ini memberi sinyal kuat bahwa nilai-nilai keadilan mulai mendominasi atas budaya diam. Selain keluarga, lembaga sosial seperti sekolah, lembaga perlindungan anak, serta organisasi masyarakat sipil juga berkontribusi penting dalam proses pemulihan korban. Kolaborasi antara keluarga dan lembaga ini menggambarkan modal sosial yang aktif dalam masyarakat, sebuah kekuatan kolektif yang mampu menekan angka kekerasan dan mempercepat keadilan bagi korban. Intervensi keluarga melalui kegiatan edukasi dan peningkatan *self-efficacy* orang tua berhasil meningkatkan kemampuan orang tua dalam mengambil tindakan preventif dan responsif saat terjadi kekerasan seksual pada anak. Ini mendukung gagasan bahwa keluarga sebagai pelapor awal merupakan bagian dari strategi perlindungan yang efektif.

Pendekatan ini juga konsisten dengan teori *modal sosial*, di mana jaringan kepercayaan dalam keluarga dan lembaga sosial menciptakan sistem dukungan yang siap siaga menghadapi isu kekerasan. Keluarga yang dulu mungkin memilih tutup mulut kini memanfaatkan modal sosialnya yakni norma, hubungan, dan kepercayaan bersama untuk melindungi anak dan memastikan adanya tindakan hukum. Melalui tindakan seperti pelaporan, pendampingan, dan koordinasi dengan berbagai lembaga, keluarga dan lembaga sosial bekerja sama menegakkan nilai keadilan dan menyediakan ruang pemulihan psikologis bagi korban. Secara keseluruhan, kombinasi keberanian keluarga dan intervensi aktif lembaga sosial menandakan terbentuknya jaringan perlindungan komprehensif berbasis keluarga dan komunitas. Ini adalah dasar untuk membangun masyarakat yang lebih responsif, adil, dan berempati dalam menangani kasus kekerasan seksual khususnya yang melibatkan anak-anak (Suwarni et al., 2022).

Tantangan Tetap Ada

Meskipun secara umum masyarakat mulai bersikap lebih terbuka, tantangan seperti rasa malu dari korban dan tekanan internal keluarga untuk tidak mempublikasikan kasus masih tetap ada. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi tetap perlu ditingkatkan agar sikap positif masyarakat dapat terus berkembang dan meluas. Korban pelecehan seksual di Pariaman jarang menghadapi stigma negatif dari masyarakat sekitar yang berujung pada pengucilan dan penilaian buruk terhadap korban. Tetapi korban merasa malu,

takut, dan enggan melapor kejadian yang dialaminya. Budaya masyarakat yang konservatif di Pariaman memperkuat stigma ini, karena norma kesucian dan pandangan negatif terhadap aktivitas seksual di luar nikah dianggap aib besar.

Hal ini menyebabkan korban tidak mendapatkan dukungan, malah sering mendapat sanksi sosial yang berat. Dalam kasus pelecehan seksual yang terjadi di Pariaman, misalnya kasus di Korong Lohong yang melibatkan 34 anak sebagai korban, masyarakat bahkan mengusir keluarga pelaku sebagai reaksi atas perbuatan tersebut. Namun, hal ini juga menunjukkan tekanan sosial yang kuat di lingkungan korban dan keluarganya. Banyak korban yang tidak berani melapor karena takut dicap buruk oleh masyarakat dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Ketakutan ini menjadi penghalang utama dalam proses pemulihan korban dan penanganan kasus pelecehan seksual. Oleh karena itu, upaya edukasi dan sosialisasi tetap perlu ditingkatkan, terutama dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan institusi pendidikan, agar transformasi sosial ini tidak berhenti di permukaan, melainkan menjangkau akar budaya yang masih menormalisasi kekerasan atau membungkam korban agar sikap positif masyarakat dapat terus berkembang dan meluas.

Korban pelecehan seksual di Pariaman jarang menghadapi stigma negatif dari masyarakat sekitar yang berujung pada pengucilan dan penilaian buruk terhadap korban. Tetapi korban merasa malu, takut, dan enggan melapor kejadian yang dialaminya. Budaya masyarakat yang konservatif di Pariaman memperkuat stigma ini, karena norma kesucian dan pandangan negatif terhadap aktivitas seksual di luar nikah dianggap aib besar. Banyak korban yang tidak berani melapor karena takut dicap buruk oleh masyarakat dan kurangnya dukungan dari lingkungan sekitar. Ketakutan ini menjadi penghalang utama dalam proses pemulihan korban dan penanganan kasus pelecehan seksual. Fenomena di Pariaman menunjukkan adanya kemajuan dalam sikap masyarakat, namun masih terdapat tantangan serius yang perlu diatasi. Beberapa korban keganasan seksual enggan melapor, bukan karena takut pengucilan karena masyarakat umumnya tidak menstigmatisasi mereka melainkan karena rasa malu dan tekanan internal keluarga untuk tidak mengekspos kasus demi menjaga "kesucian" atau reputasi. Budaya konservatif yang menekankan nilai kesucian dan reputasi keluarga memberi beban moral dan sosial yang intens, sehingga korban menghadapi stigma internal dan eksternal.

Contohnya, dalam kasus pelecehan di Korong Lohong yang melibatkan puluhan anak, masyarakat merespons dengan mengusir keluarga pelaku sebagai bentuk hukuman komunitas. Di satu sisi, ini menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap korban, namun di sisi lain, tekanan sosial terhadap keluarga korban juga meningkat, menambah beban mental dan ketakutan korban untuk buka suara. Banyak di antaranya yang memilih untuk bungkam karena khawatir dicap buruk, atau merasa bersalah karena memermalukan keluarga. studi (Syarifah, 2024) menunjukkan bahwa di banyak konteks di Indonesia, korban ragu untuk melapor karena takut dihinakan, dijauhi, dan disalahkan oleh masyarakat. Hal ini sering terjadi ketika norma kesucian sangat dijunjung tinggi: korban perempuan dikaitkan dengan kehilangan harga diri keluarga. Penyalahan korban ini adalah bentuk *victim blaming* yang dipicu budaya malu, nilai patriarki, serta kurangnya edukasi tentang hak dan perlindungan korban.

Mengingat situasi tersebut, upaya edukasi dan sosialisasi menjadi sangat penting. Perubahan sikap yang sudah terlihat yaitu masyarakat tidak lagi menstigmatisasi korban secara terbuka harus dilanjutkan hingga ke tingkat keluarga, sekolah, dan lembaga keagamaan. Tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan pendidik perlu dilibatkan dalam kampanye kesadaran tentang hak korban, hak anak, serta kebutuhan untuk membangun budaya pelaporan yang mendukung. Secara praktis, intervensi bisa berupa pelatihan tentang *trauma-informed support*, penyuluhan tentang UU TPKS, dan penguatan mekanisme pendampingan yang inklusif dan sensitif gender. dengan pendekatan edukatif dan budaya responsif, transformasi nilai saja tidak cukup; diperlukan upaya sistematis agar korban merasa aman untuk berbicara, keluarga tidak perlu menanggung beban malu, dan komunitas menjadi ruang benar-benar terbuka serta mendukung pemulihan korban.

Simpulan

Stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Pariaman masih cukup kuat dan menjadi penghalang utama bagi korban untuk melapor dan pulih. Penanganan stigma ini memerlukan edukasi, dukungan sosial, dan kebijakan yang mendukung perlindungan korban secara komprehensif. Berdasarkan hasil penelitian mengenai stigma masyarakat terhadap korban pelecehan seksual dalam keluarga di Kota Pariaman, dapat disimpulkan bahwa stigma masih menjadi penghalang utama dalam proses pemulihan korban dan penanganan kasus secara menyeluruh. Stigma tersebut muncul dalam berbagai bentuk, antara lain: pertama, pelabelan negatif terhadap korban sebagai aib keluarga, yang menyebabkan korban sering dipinggirkan dan disalahkan atas kejadian yang menimpanya. Kedua, adanya tekanan sosial untuk tidak membuka kasus ke ranah publik atau hukum demi menjaga "nama baik keluarga", yang

menyebabkan banyak kasus pelecehan seksual dalam keluarga tidak dilaporkan atau diselesaikan secara informal. Ketiga, minimnya pemahaman masyarakat tentang dampak psikologis pelecehan seksual menyebabkan korban kerap kali dianggap lemah, berlebihan, atau mencari perhatian, sehingga tidak mendapat dukungan sosial yang memadai. Keempat, budaya patriarki yang masih kuat di lingkungan masyarakat Pariaman memperkuat ketimpangan kuasa antara pelaku dan korban, terutama jika pelaku merupakan figur yang dihormati dalam keluarga atau komunitas.

Meskipun demikian, terdapat indikasi pergeseran pandangan di sebagian kelompok masyarakat, terutama di kalangan muda dan pihak-pihak yang terlibat dalam pendampingan korban seperti LSM dan P2TP2A, yang menunjukkan kepedulian serta pemahaman lebih progresif terhadap pentingnya perlindungan korban. Temuan ini mengindikasikan perlunya pendekatan kultural dan edukatif dalam menanggulangi stigma yang masih kuat mengakar. Penelitian ini masih terbatas pada pemetaan stigma dari sudut pandang masyarakat dan belum mendalami secara menyeluruh peran institusi formal seperti sekolah, tokoh agama, serta media lokal dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, peluang riset lanjutan masih terbuka luas, terutama dalam melihat strategi konkret yang dapat dilakukan untuk menurunkan stigma dan meningkatkan keberanian korban dalam melaporkan serta mengakses bantuan hukum dan psikologis. Riset ini penting dilakukan oleh peneliti selanjutnya agar dapat merancang intervensi berbasis budaya yang mampu menghapus stigma dan menciptakan ruang aman bagi korban kekerasan seksual dalam keluarga, khususnya di lingkungan masyarakat yang kental dengan nilai adat seperti Kota Pariaman.

Rujukan

- Albarri, A. H., & Sofiana, N. E. (2023). Model Intervensi Komunitas Amita WCC Ponorogo pada Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Indonesian Journal of Gender Studies*, 3(1), 5–14. <https://jurnal.umpo.ac.id/index.php/IJoGS>
- Darmayasa, I. M., & Natanael, R. J. M. (2023). Gangguan Stres Pasca Trauma pada Kasus Pelecehan Seksual: Case Report. *Jurnal Kesehatan Reproduksi*, 10(2). <https://doi.org/10.22146/jkr.78372>
- Habibah, A. R. (2025). Pengaruh Promosi dengan Keputusan Pembelian di E-Commerce Shopee pada Mahasiswa Psikologi Universitas Medan Area. Universitas Medan Area.
- Huraerah, A. (2012). *Kekerasan terhadap Anak: Perspektif Psikologi, Hukum, dan Sosial Budaya*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Khristianti, L. M. (2021). Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Media Juris*, 4(2), 145. <https://doi.org/10.20473/mi.v4i2.25066>
- Listyaningsih, L., & Ismanto, G. (2022). Strategi Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berbasis Masyarakat di Wilayah Pesisir Kabupaten Serang. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.31506/jipags.v6i1.13072>
- Mas'udah, S. (2022). The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence. *Society*, 10(1), 1–11. <https://doi.org/10.33019/society.v10i1.384>
- Pahlevi, R. (2021). Stigma Sosial Terhadap Korban Kekerasan Seksual – LPM Perspektif. In *Lpmperspektif.Com*. <https://lpmperspektif.com/2021/03/02/stigma-sosial-terhadap-korban-kekerasan-seksual/>
- Prameswari, V., & Khoirunnisa, R. N. (2020). Penerimaan Diri Pada Perempuan Korban Pelecehan Seksual yang Dilakukan Oleh Keluarga. *Character: Jurnal Penelitian Psikologi*, 7(4), 62–78.
- Putri, L. R. (2021). Data kasus kekerasan seksual di Indonesia menurut Kemen PPPA. <https://nasional.tempo.co/read/1462138/kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-meningkat>
- Qurotul, F., Solehati, S., & Prasetya, B. (2022). Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Serta Dampak Psikologis Yang Dialami Korban. *Al-Athfal: Jurnal Pendidikan Anak*, 3(2), 92–97. <https://doi.org/10.46773/alathfal.v3i2.488>
- Rahmi, A., & Siregar, H. (2020). Community-Based Recovery For Sexual Violence Victims: The Case of Hapsari. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 20(1), 1–18. <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i1.13520>
- Soehardiman, M. K., Scarvanovi, B. W., & Sari Agustina, L. S. (2024). Studi Fenomenologi Resiliensi pada Perempuan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmiah Psikologi Candrajawa*, 9(1), 28. <https://doi.org/10.20961/jip.v9i1.75246>
- Suwarni, L., Selviana, S., & Vidyastuti, V. (2022). Pencegahan Primer Kekerasan Seksual Anak Melalui Intervensi Berbasis Keluarga di Kota Pontianak. *Jurnal Kesehatan Manarang*, 8(3), 239. <https://doi.org/10.33490/jkm.v8i3.554>
- Syarifah, D. (2024). Perspektif terhadap Kekerasan Seksual pada Mahasiswa. *Jurnal Tambora*, 8(3), 8-16.